



KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Sambutan Ketua Umum MIPI (Dr. Bahtiar Baharuddin, Msi)

Muhadam Labolo | Yudi Latif | Firman Noor | Muchlis Hamdi | Armin Arsyad
Sadu Wasistiono | Muhammad | Leo Agustino & Nirvana Latifah
R. Siti Zuhro | Kiyotaka Yokomichi & Laode Buzyali Fajman Sanbigs
Ferry Daud Liando | Juanda | Meranti | Petrus Polyando
Lely Arrianie | Dyaloka Puspita Ningrum | Lisa Adhrianti
Ermaya Suradinata | M. Aries Djaenuri | Dede Mariana
Utang Suwiryo





KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Sekitar delapan dekade yang lalu, Mohandas K Gandhi menengarai adanya ancaman yang mematkan dari tujuh dosa sosial; politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, pemiagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, dan peribadatan tanpa pengorbanan. Ketujuh dosa sosial ini sekarang telah menjadi warna dasar dari kehidupan kita. Kehidupan kota (polis) yang semestinya menjadi basis keberadaban (madani) terjerumus kedalam apa yang disebut Machiavelli sebagai kota korup (citta corrottissima), atau apa yang di sebut Al Farabi sebagai kota Jahiliyah (almudun al-jahiliyyah). Dr. Yudi Latif



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Muhadam Labolo
Yudi Latif
Firman Noor
Muchlis Hamdi
Armin Arsyad
Sadu Wasistiono
Muhammad
Leo Agustino
Nirvana Latifah
R. Siti Zuhro
Kiyotaka Yokomichi
Laode Buzyali Fajman Sanbig
Ferry Daud Liando
Juanda
Meranti
Petrus Polyando
Lely Arrianie
Dyaloka Puspita Ningrum
Lisa Adhrianti
Ermaya Suradinata
M. Aries Djaenuri
Dede Mariana
Utang Suwiryo



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Penulis : Muhadam Labolo | Yudi Latif | Firman Noor |
Muchlis Hamdi | Armin Arsyad | Sadu
Wasistiono | Muhammad | Leo Agustino |
Nirvana Latifah | R. Siti Zuhro | Kiyotaka
Yokomichi | Laode Buzyali Fajman Sanbigs |
Ferry Daud Liando | Juanda | Meranti | Petrus
Polyando | Lely Arrianie | Dyaloka Puspita
Ningrum | Lisa Adhrianti | Ermaya
Suradinata | M. Aries Djaenuri | Dede Mariana
| Utang Suwiryo

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Hikmah Millenia Saputri

ISBN : 978-623-151-521-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

**Eureka Media Aksara bekerjasama dengan
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia**

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR KATA

Syukurlah alhamdulillah buku di tangan pembaca dengan judul Kepemimpinan Pemerintahan selesai di tulis. Sebagian topik dalam buku ini diadaptasi dari tulisan terpilih di jurnal ilmu pemerintahan MIPI. Sisanya dilengkapi oleh para penulis generasi selanjutnya yang tumbuh dan berkembang sesuai eranya.

Buku ini sengaja tidak di atur seketat Buku Putih Pemerintahan dan Buku Etika Pemerintahan, menimbang topik yang dikirimkan para penulis cukup beragam sehingga cukup menyulitkan editor untuk memilah sesuai tekanan dalam bingkai kepemimpinan pemerintahan.

Buku ini diselesaikan dengan harapan menjadi semacam pemandu ideal lewat dialektika teks yang melingkupi filsafat moral, teori, konsep, paradigma, hingga praksis kepemimpinan pemerintahan ketika bertemu di moment pesta demokrasi tahun 2024.

Dengan menyadari segala kekurangan dan kelebihan yang menempel dalam buku ini, kiranya Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dengan tegak telah mempertanggungjawabkan dirinya kehadapan publik soal moralitas kepemimpinan dalam pemerintahan.

Tentu saja, beriring ucapan terima kasih kepada para penulis dan pembaca, MIPI juga memohon maaf atas ketidaksempurnaan dan keterlambatan yang mungkin menjadikan buku ini terlihat cacat. Semua itu tak lain kecuali kealpaan editor yang sekalipun telah membaca berulang-ulang tetap saja tak luput dari kekhilafan.

Lepas dari itu, buku ini bertujuan memberikan wawasan keilmuan tentang kepemimpinan pemerintahan yang dengan pemahaman itu kita berharap telah memberi kontribusi kognitif bagi pemerintah, masyarakat, dan pembelajar pemerintahan.

Semoga buku ini berguna di tangan pembaca yang budiman.

Jakarta, 1 September 2023

Penyunting
Prof. Dr. Muhadam Labolo, MSi

SAMBUTAN KETUA UMUM MIPI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Pancasila

Puji syukur penulisan buku ini telah selesai dilakukan. Tentu saja untuk pertamakali saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sdr. Prof. Dr. Muhadam Labolo, MSi yang telah membagi waktunya untuk menyelesaikan buku ketiga dalam dua tahun terakhir. Sesuai janji saya, kita telah menyelesaikan tiga buku yaitu Buku Putih Pemerintahan, Etika Pemerintahan, dan Kepemimpinan Pemerintahan. Semua tunggakan ini hanya mungkin terealisasi berkat dukungan segenap anggota dan simpatisan MIPI yang terus bekerja tanpa kenal lelah.

Buku di tangan para pembaca kali ini mengusung tema kepemimpinan pemerintahan. Tentu saja dua kata itu merupakan gejala yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sejak dulu, sekarang hingga masa akan datang. Kepemimpinan dan pemerintahan adalah dua fenomena yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kepemimpinan merujuk pada kemampuan seseorang memengaruhi, atau menggerakkan orang lain dan seluruh sumber daya yang tersedia, untuk mengikuti pikiran, tindakan para pemimpin maupun tujuan organisasi.

Sementara itu, pemerintahan menunjukkan gejala dimana kepemimpinan tumbuh. Pemerintahan menjadi wadah dimana kepemimpinan secara personal menunjukkan karakternya apakah demokratis, otoriter, atau totaliter. Dalam wadah pemerintahan itu kepemimpinan menampakkan dirinya sebagai *leader*, atau dengan nama lain seperti kepala negara, kepala pemerintahan, perdana menteri, raja, presiden, direktur, menteri, gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa dan lain sebagainya.

Dalam wadah pemerintahan itu pula, kepemimpinan menghasilkan proses yang menghubungkan antara mereka yang dipimpin dan mereka yang memimpin. Proses itu dihubungkan oleh penggunaan wewenang, layanan, relasi, serta tujuan yang konkrit seperti kesejahteraan, maupun tujuan yang relatif seperti kebahagiaan.

Pemerintahan menyediakan seperangkat sistem yang dapat digunakan bagi praktek kepemimpinan. Dalam hal ini sistem pemerintahan presidensial memberi corak yang berbeda dengan kepemimpinan yang bersifat parlementer. Demikian pula campuran keduanya. Maknanya kepemimpinan menyesuaikan dengan wadah sistem pemerintahan dimana peran kepemimpinan itu diperlukan.

Tentu saja kepemimpinan pemerintahan dalam konteks yang luas itu kita batasi dengan meminjam istilah Prof. Sadu Wasistiono, yaitu kepemimpinan dua kaki. Dalam prakteknya, pola kepemimpinan pemerintahan selalu berhadapan dengan tuntutan bawahan dalam organisasi birokrasi pemerintahan, sekaligus bertemu wajah dengan basis konstituen yang nyata maupun tidak.

Dewasa ini basis konstituen nyata semakin sedikit (*followers*). Di tengah perubahan paradigma 5.0, basis konstituen itu berwujud *netizen* dari *citizen*. Kelompok ini pun dapat kita temukan seperti komunitas pendengung (*buzzer & influencer*). Dalam kasus pemilu 2019 kita bisa merasakan lewat dukungan sekaligus perseteruan laten antara *cebong & kampret*.

Dengan realitas itu, tantangan kepemimpinan pemerintahan itu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Penggunaan wewenang akan semakin terbatas oleh sebab bergesernya otoritas pemerintah yang selama ini bersifat monopolistik. Layanan pemerintahan secara kuantitatif akan berkurang disebabkan meningkatnya privatisasi.

Relasi yang tadinya sangat hirarkhis akan dengan sendirinya bergeser menjadi *heterarkhis*. *Government* kini menjadi *governance*. Artinya pemerintahan yang sempit kini menjadi luas dan bersifat fungsional. Paradigma *good governance* kini melangkah ke *dynamic government*, *digital government* dan *agile government* yang semakin kompleks (super digital/IA).

Akhirnya, tujuan pemerintahan yang sehari-harinya berkuat dengan kepuasan jasmaniah (kesejahteraan) kini kembali ke pencarian hal-hal yang bersifat pemaknaan, hakekat, spiritualitas, maupun kepuasan ruhaniah. Mungkin ini makna kebahagiaan yang dimaksud. Dalam kaitan itulah tantangan kepemimpinan

pemerintahan kini diarahkan, memandu para pengikutnya, entah bawahan dalam ruang birokrasi maupun *followers* dalam realitas nyata dan tak nyata agar mampu mencapai kehidupan bersama yang lebih baik.

Sebagai penutup sambutan ini, saya selaku Ketua Umum MIPI sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor naskah ini. Seturut dengan itu, dengan menyadari akan berbagai kekurangan disana-sini, kami mohon maaf. Semoga buku-buku yang diterbitkan MIPI selama ini mampu menjadi sedikit *oase* di tengah pertenggaran pikiran bagi kemajuan masyarakat, bangsa, pemerintah, dan negara yang kita cintai.

Jakarta, 1 September 2023
Ketua Umum MIPI

Dr. Bahtiar Baharuddin, MSi

DAFTAR ISI

PENGANTAR KATA.....	iii
SAMBUTAN KETUA UMUM MIPI.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
Mengatasi Krisis Melalui Kepemimpin Berkarakter Pancasila Oleh. Yudi Latif	1
Sumber Kepemimpinan Nasional di Tengah Arus Demokrasi Kontemporer Oleh. Firman Noor	11
Kepemimpinan Pemerintahan dalam Perspektif Manajerial Oleh. Muchlis Hamdi.....	44
Pemimpin Responsif Cermin Pemerintahan Demokrasi Oleh. Armin Arsyad.....	55
Model Kepemimpinan Pemerintahan Dua Kaki dan Dua Inti Oleh. Sadu Wasistiono	71
Model Kepemimpinan Pemerintahan Transformatif Menuju Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Beretika Oleh. Muhammad	99
Kepemimpinan Sub-Nasional dan <i>Regional Development</i> : Komparasi Tiga Gubernur Oleh. Leo Agustino & Nirvana Latifah.....	129
Demokrasi, Kepemimpinan dan Pemerintahan Indonesia Era Digital Oleh. R. Siti Zuhro.....	156
Kepemimpinan Pemerintahan Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> Oleh. Kiyokata Yokomichi dan Laode Buzyali Fajman Sanbigs190	
Relevansi Kelembagaan Partai Politik Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Oleh. Ferry Daud Liando.....	215
Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Pemimpin Pemerintahan yang Berkualitas Oleh. Juanda.....	239

Konstruksi Identitas Kepemimpinan Pemerintahan Jokowi Oleh. Meranti.....	259
Pengembangan Kepemimpinan Transformasional di Level Lokal pada Era New Normal Oleh. Petrus Polyando.....	274
Retorika dan Model Komunikasi Kepemimpinan Pemerintahan Oleh. Lely Arriane	333
Iklim Komunikasi Organisasi Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Oleh. Dyaloka Puspita Ningrum.....	350
<i>Branding</i> Komunikasi Politik Media Sosial Instagram Oleh Calon Pemimpin Muda Menuju Kontestasi Pemilu 2024 di Bengkulu Oleh. Lisa Adhrianti	369
Menata Ulang Rekrutmen Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia Oleh. Muhadam Labolo.....	394
Strategi Memilih Pemimpin Beretika Pemerintahan Oleh. Ermaya Suradinata	427
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Indonesia, Upaya Mengefektifkan Implementasi Reformasi Birokrasi Oleh. M. Aries Djaenuri.....	432
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia Oleh. Dede Mariana.....	459
Filsafat Pemerintahan Augustinus (354-430) Oleh. Utang Suwiryo	489



KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

Muhadam Labolo | Yudi Latif | Firman Noor | Muchlis Hamdi |
Armin Arsyad | Sadu Wasistiono | Muhammad | Leo Agustino |
Nirvana Latifah | R. Siti Zuhro | Kiyotaka Yokomichi | Laode
Buzyali Fajman Sanbigs | Ferry Daud Liando | Juanda | Meranti
| Petrus Polyando | Lely Arrianie | Dyaloka Puspita Ningrum |
Lisa Adhrianti | Ermaya Suradinata | M. Aries Djaenuri | Dede
Mariana | Utang Suwiryo



Mengatasi Krisis Melalui Kepemimpin Berkarakter Pancasila

Oleh. Yudi Latif¹



Perkembangan demokrasi Indonesia ibarat berlari di atas landasan yang goyah. Perubahan demi perubahan terus terjadi di atas kerapuhan basis moral kenegaraan. Politik sebagai teknik mengalami pencangghihan, tapi politik sebagai etik mengalami kemunduran.

Praktik politik cenderung mengalami pengerdilan menjadi sekadar perjuangan kuasa demi kuasa; bukan politik sebagai perjuangan mewujudkan kebajikan bersama. Politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air dengan minyak. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti ketakwaan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan mengalami kelumpuhan.

Misi besar reformasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme masih jauh dari harapan. Proses konsolidasi demokrasi terhambat oleh proses demokratisasi (perluasan dan pendalaman) korupsi. Praktik korupsi melanda seluruh lembaga dan instansi kenegaraan, serta merembes ke segala lapisan dari pusat hingga daerah.

Seiring dengan laju korupsi, wajah negeri seperti tercermin dari warta media menampilkan buruk rupa: kemiskinan keteladanan, kehilangan keadilan dan perlindungan hukum, kesenjangan sosial, keretakan jalinan sosial, perluasan tindak kekerasan, kejahatan dan premanisme, gurita narkoba, kerusakan di wilayah tambang dan perkebunan, kecelakaan transportasi dan kerawanan sarana publik.

¹ Ketua Harian Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila. Pengarang buku *"Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila"*.

Sumber Kepemimpinan Nasional di Tengah Arus Demokrasi Kontemporer

Oleh. Firman Noor



A. Pendahuluan

Demokrasi saat ini telah menjadi sebuah tatanan yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Keberadaannya telah melahirkan semangat baru untuk mewujudkan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam konteks kepemimpinan, demokrasi telah membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengambil kesempatan dalam turut berperan mengisi posisi-posisi kunci di pemerintahan. Saat ini kepemimpinan politik, baik di level nasional maupun lokal, telah banyak diisi oleh beragam figur dengan berbagai latar belakang. Secara umum, mereka adalah perwakilan atau kader dari partai politik yang telah terpilih melalui sebuah proses pemilihan yang melibatkan banyak kalangan.

Formasi kepemimpinan politik, dengan demikian, sebagai fondasi dari kepemimpinan pemerintahan adalah *resultante* dari kebangkitan politik massa, setelah sebelumnya ditentukan oleh model politik elitis. Kebangkitan politik pada masa ini secara esensial menandai juga adanya sebuah kepercayaan baru antara masyarakat dengan partai-partai politik untuk menentukan kepemimpinan politik. Pada awal reformasi, kepercayaan itu demikian tinggi. Kebanyakan rakyat cukup meyakini bahwa partai, termasuk elite dan kadernya, akan memberikan sebuah perubahan yang signifikan bagi kehidupan mereka. Namun demikian, seiring dengan perjalanan waktu, muncul persoalan dalam konteks kepercayaan itu. Fenomena tingginya kepercayaan kepada partai-partai seolah tinggal cerita manis di awal sebuah orde.

G. Penutup

Dalam situasi politik saat ini, dengan arus demokratisasi yang semakin pragmatis dan delegitimasi citra partai yang makin membesar (terutama sebagai konsekuensi dari kinerja partai yang tidak kunjung memuaskan), maka perlu dipikirkan adanya peluang bagi kandidat non-partai politik untuk dapat makin berkiprah dalam kepemimpinan politik. Memaksimalkan peluang terpilihnya figur terbaik dengan memberikan kesempatan pada semua kalangan diharapkan dapat makin menyegarkan kehidupan politik dan membawa bangsa pada sebuah kepemimpinan politik yang lebih aspiratif, efektif dan bertanggung jawab. Pembahasan di atas mengisyaratkan bahwa dari beragam aspek yang relevan pembatasan kepemimpinan politik hanya untuk kalangan partai tidak menemukan pembenaran akademis maupun empiris yang kuat. Meski demikian, kajian ini tidak bermaksud mereduksi dan menghilangkan peran dan keberadaan partai sebagai salah satu elemen terpenting dari kehidupan demokrasi. Selain itu saat ini persoalan kepemimpinan nasional tidak saja ditentukan oleh faktor partai politik secara individu, namun juga sebuah koalisi sebagai konsekuensi dari aturan main yang ada.

Daftar Pustaka

- Almond, G. (1974). *Political party and party system*. Dalam *Comparative Politics Today*. Boston: Little Brown and Company.
- Almond, G. dan Coleman, J. (1961). *The politics of the developing areas*. New Jersey: Princeton University Press.
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap politik kartel. Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-LSI.
- Aspinall, E. dan Mietzner, M. (2010). *Problems of democratisation in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Chaniago, A. (2009). Sosok ideal presiden dan kepresidenan 2009-2014. Dalam Nurhasim, M. dan Bhakti, I.N. *Sistem*

presidensial dan sosok presiden ideal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cheibub, J. A. (2007). *Presidentialism, parliamentarism and democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Cole, A. (2013). Perbandingan partai politik: sistem dan organisasi. Dalam Ishiyama, J.T dan Breuning, M. Eds. *Ilmu politik. Jilid 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Cole, A. (1997). *Francois mitterand. A study in political leadership*. New York: Routledge.

Gafar, A. (1990). Sistem kepartaian yang hegemonik dan terobosan demokrasi Indonesia". Dalam Siregar, A.F (dkk). *Percikan pemikiran fisipol UGM tentang pembangunan*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Haris, S. (1991). *PPP dan politik orde baru*. Jakarta: Grasindo.

Hatta, H. N. (1983). *Dwitunggal: analisa pola kepemimpinan nasional periode 1945-1956*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI.

Huntington, S. P. (1968). *Political order in changing society*. New Haven: Yale University Press.

<https://www.berdikarionline.com/di-balik-rendahnya-party-id-kita-ada-oligarki-yang-menggurita/>.(2021).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/berapa-banyak-warga-yang-percaya-partai-politik-ini-hasil-surveinya>. (2022).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/02/survei-indikator-politik-atas-kepercayaan-masyarakat-terhadap-lembaga-tni-masih-memimpin>. (2023).

<https://www.merdeka.com/politik/survei-indikator-politik-tingkat-kepercayaan-publik-pada-demokrasi-naik-jadi-772.html>. (2022).

<https://rumahpemilu.org/party-id-rendah/>. (2021)

- Kartono, K. (2001). *Pemimpin dan kepemimpinan. Apakah pemimpin abnormal itu?*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Leksono, N. (2009). Kepemimpinan era pasca-Soeharto tak cukup hanya berbekal hasrat. Dalam Basyar, H dan Tobing, F.B.L. *Kepemimpinan nasional, demokratisasi dan tantangan globalisasi*. Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia-Pustaka Pelajar.
- Linz, J. (1990). The Perils of Presidentialism. *Journal of Democracy* 1: 51-69.
- Liddle, W. (1996). *Leadership and culture in Indonesian politics*. Sydney: Allen and Unwin.
- Michels, R. (1966). **Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy**. New York: The Free Press.
- Mughan, A dan Petterson, S. C. (1992). *Political leadership in democratic societies*. Chicago: Nelson-Hall Publishers.
- Noor, F. (2012). Evaluasi kondisi kepartaian 14 tahun reformasi dalam perspektif pelembagaan sistem kepartaian. *Masyarakat Indonesia*, Volume 38, No.2, Desember: 221-250.
- Noor, F. (2013). Anti-party phenomenon: the causes, effects and solutions", international seminar, *Socio-Political and Economic Reform in Southeast Asia: Assessments and the Way Forward*. Coorganized by LIPI-CSEAS-Kyoto University, 11 March 2013, Jakarta.
- Noor, F; Siregar, S.N; Hanafi, R.I; Sepriwasa, D. (2021). The Implementation of Direct Local Election (Pilkada) and Money Politics Tendencies: The Current Indonesian Case, *Politik Indonesia. Indonesian Political Science Review*, 6 (2), August 2021, pp. 227-246
- Pusat Penelitian Politik-LIPI. (2012). *Survei nasional 25 Juni-10 Juli 2012*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.

- Stevens, A. (2003). *Government and politics of France*. New York: Palgrave.
- Tan, P. J. (2006). Indonesia seven years after Soeharto: party system institutionalization in a new democracy. *Contemporary Southeast Asia*, Vol.28, No.1
- Uhlen, A. (1997). *Oposisi berserak: arus deras demokratisasi gelombang ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Kepemimpinan Pemerintahan dalam Perspektif Manajerial Oleh. Muchlis Hamdi²



A. Pendahuluan

Pemerintahan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia modern. Melalui proses berpemerintahan, setiap orang menjalani kehidupannya bersama dengan orang-lain dalam suatu tatanan yang teratur. Keteraturan tersebut berkaitan dengan interaksi antara sesama warga negara dan juga antara warga negara dan negara. Dengan keteraturan tatanan tersebut, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam upaya mewujudkan makna yang diidealkannya, yang umumnya sering diungkapkan dengan istilah adil, makmur, sejahtera, dan bahagia.

Pemerintahan juga menunjukkan sisi lain bagi kehidupan manusia. Cukup banyak catatan sejarah yang mengungkapkan berlangsungnya pemerintahan yang memunculkan kekelaman dalam hidup warga negara. Ketika ini terjadi, maka sejarah juga mencatat bahwa kekelaman hidup warga negara tersebut terjadi sebagai akibat dari berlangsungnya kepemimpinan pemerintahan yang sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah nilai yang mendasari eksistensi suatu pemerintahan selalu bermakna konstruktif bagi kehidupan warga negara?; bagaimana terjadinya kepemimpinan pemerintahan yang tidak berpihak pada kepentingan warga negara?; dan bagaimana membangun kepemimpinan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan warga negara?. Dalam tulisan ini, jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut dipaparkan dalam perspektif manajerial.

² Guru Besar pada IPDN, Pengurus Pusat MIPI

suasana demokratis, memiliki akuntabilitas tinggi, dan mengamalkan etika pemerintahan.

Daftar pustaka

- Bonney, Rust W. 1969. *The Pattern of Government*. London: Pitman London.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- King, Cheryl Simrell & Camilla Stivers. 1998. *Government is Us: Public Administration in an Anti-Government Era*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Lakoff, Sanford. 1996. *Democracy: History, Theory, Practice*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Mosher, Frederick C. 1982. *Democracy and the Public Service*. New York: Oxford University Press.
- Partridge, P.H. 1971. *Consent & Consensus*. London: Macmillan.
- Shafritz, Jay M., E.W. Russell, & Christopher P. Borick. 2009. *Introducing Public Administration*. 6th edition. New York: Pearson-Longman.
- Turner, Mark & Hulme, David. 1997. *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. London: Macmillan Press Ltd.

Pemimpin Responsif

Cermin Pemerintahan Demokrasi

Oleh. Armin Arsyad⁶



A. Pendahuluan

Jean Jacques Rousseau berpendapat kedaulatan rakyat tidak dapat diserahkan apalagi dibagi-bagi. Sebab kedaulatan rakyat adalah hal yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. Kedaulatan yang dimiliki oleh individu merupakan hal yang hakiki dalam kehidupan manusia.

Pendapat J.J. Rousseau tersebut menunjukkan bahwa pemerintah yang demokrasi hendaknya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya pemerintah hendaknya senantiasa memperhatikan dan menjunjung tinggi apa yang menjadi kehendak atau keinginan rakyat. Pemerintah hendaknya membuat program dan kebijakan yang sejalan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Apa yang menjadi kehendak rakyat itulah yang dijabarkan dalam program dan kebijakan pemerintah.

Kebijaksanaan yang baik apabila menyenangkan sebanyak-banyaknya orang. Itulah sebabnya disebut sebagai kebijaksanaan, atau bijak disana. Artinya keputusan pemerintah itu diperuntukkan untuk kebaikan ummat manusia, bukan untuk kebaikan segelintir orang, atau kepentingan kelompok atau rezim.

Pemerintah yang baik hendaknya berupaya menempatkan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan dirinya dan kelompoknya. Untuk mewujudkan hal itu maka pemerintah hendaknya senantiasa menyelami aspirasi dan jeritan hati nurani rakyat. Untuk mengetahui apa yang menjadi

⁶ Guru Besar Ilmu Politik Fisip Universitas Hasanuddin.

Daftar Pustaka

- Armin, 1997, Dilema Antara Kontrol Pemerintah Pusat Dan Otonomi Daerah Kasus: Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Tesis, Jakarta: PPSUI..
- _____, 2003, Hubungan Pusat Daerah Konflik di bidang Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur, (Disertasi), Jakarta, PPS-UI.
- Batley, Richard and Garry Stoker, (ED.), 1991, Local Government in Europe: Trends and Developments, London, Mac Millan Press LTD.
- Bowman, Ann O'M, Chicard C. Kearney, 1996, State and Local Government, Boston, Houghton Mifflin Company, Third Edition.
- Huntington, Samuel P., Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: Grafiti 1997.
- Jha S.N., and P.C. Marthur 1999, Decentralization and Local Politics, New Delhi, Sage Publication..
- Lipson, Leslie, The Democratic Civilization, New York: Feffer And Simons INC., 1964
- Noer Deliar, Pemikiran Politik Di Negerei Barat, Jakarta: Mizan, 1997.
- Rauf Maswadi, "Teori Demokrasi Dan Demokrasi", Pidato Diucapkan Pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Salemba Raya 6, 1 Nopember 1997.
- Rousseau, Jean Jacques, Kontrak Sosial, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Stoker, Garry, 1991, The Politics of Local Government, London, The Micmillan Press, Second Edition.

Model Kepemimpinan Pemerintahan Dua Kaki dan Dua Inti⁷

Oleh. Sadu Wasistiono⁸



A. Pendahuluan

Gejala kepemimpinan adalah gejala universal karena ada pada setiap kelompok masyarakat, baik yang besar, sedang, maupun kecil. Bahkan gejala kepemimpinan juga ada pada dunia binatang. Kouzes dan Posner dalam kata pengantar bukunya menyebutkan bahwa “*leadership is everyone’s business*”.⁹ Sebagai gejala universal tidaklah mengherankan apabila banyak sekali pakar yang menulis buku tentang kepemimpinan. Tetapi umumnya buku yang ditulis adalah kepemimpinan dalam dunia bisnis yang ditandai dengan iklim kompetisi yang tajam dan perubahan lingkungan yang sulit diprediksi, sehingga diperlukan pemimpin yang inovatif serta biasa memakai pola “*thinking out of the box*”. Prinsipnya bisnis adalah dunia yang penuh dengan kompetisi, mereka harus siap untuk maju dan tumbuh atau akan tersingkir.¹⁰

⁷ Tulisan disiapkan untuk Jurnal MIPI Edisi Ke-46. Sebagian materi diambil dari Buku “Kepemimpinan Pemerintahan” yang sedang penulis siapkan untuk diterbitkan.

⁸ Dosen IPDN, Guru Besar Bidang Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

⁹ Kouzes, James.M and Barry Z. Posner, 2011. *The Five Practices of Exemplary Leadership : Government*. Published by Pfeiffer, San Fransisco. page preface.

¹⁰ Sebagai ilustrasi, apabila kita mencari judul “*leadership books*” melalui www.amazon.com - sebuah toko buku elektronik yang terbesar di dunia, akan diperoleh angka 92.516 buku. Apabila mencari dengan judul “*government leadership books*” akan ketemu angka 8.511 buku yang sebagian merupakan autobiografi para pemimpin negara terutama pada posisi presiden atau perdana

melayani masyarakat secara langsung sudah seharusnya memiliki dan menjalankan kedua bentuk kepemimpinan, baik kepemimpinan organisasional maupun kepemimpinan sosial karena pengikutnya memang berasal dari dua kelompok yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Bingham, Jason E; 2013. *Cultureship - The A C B's of Business Leadership*; River Grove Books, Austin.
- Hersey, Paul and Kenneth Blanchard, 1969. *Management of Organizational Behavior - Utilizing Human Resources*. New Jersey/Prentice Hall.
- Holmes, Douglas, 2001. *E-Govt - eBusiness Strategies for Government"*. Nicholas Brealey Publishing, Finland.
- Huntington, Samuel P; 1991. **The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century**. University of Oklahoma Press.
- Ingraham, Patricia W & Barbara S. Romzek, 1994. *New Paradigm for Government : Issues for the Changing Public Service*. Jossey Bass Business and Management Series.
- Kakabadse, Andrew, Nada Kakabadse, Kalu Kalu (editors), 2009. *Citizenship : A Reality Far From Ideal*.
- Kaplan, Robert S & Norton, D.P. 1996. *The Balanced Scorecard : Translating Strategy into Action*. Boston, MA - Harvard Business School Press.
- Kellerman, Barbara, 2008. *Followership : How Followers Are Creating Change and Changing Leaders (Center for Public Leadership)*. Harvard Business School Publishing, Boston, Massachusetts.
- Kilmann, Ralph. H, 2001. *Quantum Organization - A New Paradigm for Achieving Organizational Success and*

- Personal Meaning*; Davies-Black Publishing, Palo Alto, California.
- Koehler, Jerry W and Joseph M. Pankowski, 1997. *Transformational Leadership in Government*. St.Lucie Press. Delray Beach, Florida.
- Kouzes, James.M and Barry Z. Posner, 2011. *The Five Practices of Exemplary Leadership : Government*. Published by Pfeiffer, San Fransisco.
- Lathrop, Daniel dan Laurel Ruma, 2010. *Open Government : Collaboration, Transparency, and Participation in Practice*; O' Relly Media Inc. USA
- Nixon, Paul G; Vassiliki N. Koutrakou, and Rajash Rawal (editors). 2010. *Understanding E-Government in Europe- Issues and Challenges*. Penerbit Routledge, New York.
- Noveck, Beth Simone, 2009. *Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful*; Brooking Institution Press. Washington, USA.
- Osborne, David & Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison - Wesley Publication Co.
- Pamudji, Suparni, 1985. **Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia**; Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Riggio, Ronald E; Ira Chaleff and Jean Lipman-Blumen (editors) 2008. *The Art of Followership - How Great Followers Create Great Leaders and Organizations*; Published by Jossey-Bass, San Francisco.
- Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong, 2009. **Metodologi Ilmu Pemerintahan**, Edisi Pertama Cetakan Ketiga. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Savage, Charles M, 1990. *Fifth Generation Management : Integrating Enterprise Through Human Networking*; Digital Press.

Savas, E.S. 1987. *Privatization - The Key to Better Government (Public Administration and Public Policy)*. Chatham House Series on Change in American Politics.

Wall, Bob; Robert S. Solum and Mark R. Sobol; 1999. **The Visioner Leaders-Pemimpin yang Bervisi Kuat**; Terjemahan oleh Zoelkifli Kasip, Penerbit Interaksara, Batam.

Sumber internet :

ibam.com/pubs/jbam/articles/vol7/n03/JBAM735Followership.pdf;
en.wikipedia.org/wiki/Hollow_state.

www.thefreedictionary.com/quango

www.merriam-webster.com/dictionary/quango
dictionary.reference.com/browse/estate.

www.thefreedictionary.com/the+three+estates.

www.wordnik.com/words/cyberdemocracy.

Model Kepemimpinan Pemerintahan Transformatif Menuju Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Beretika

Oleh. Muhammad



A. Pendahuluan

Pancasila Sebagai Sumber Norma Dalam Bernegara Negara Hukum Berdasarkan Etika Pancasila Pancasila adalah sumber hukum tertinggi dalam konsep kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan falsafah kebangsaan dan ke-Indonesiaan yang tidak bisa dipisahkan dari semua rangkaian norma kehidupan bernegara. Pancasila hendaklah dipahami sebagai fondasi atau dasar moral dan etika kehidupan bernegara. Pancasila harus diletakkan pada setiap sendi-sendi kehidupan karena ia merupakan standar norma ideal dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah nilai-nilai Pancasila yang mengandung makna etika dan moral baik secara privat individu maupun secara universal. Maka pancasila itu harus melekat dan menjadi pedoman praktik dalam etika kehidupan berbangsa. Pancasila merupakan warisan karya intelektual para pendahulu bangsa yang harus dijadikan rujukan norma kehidupan sosial. Oleh karena Pancasila merupakan sumber tertinggi dari segala nilai norma termasuk norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila harus dijadikan sebagai acuan bagi penyelenggara negara terutama dalam merumuskan atau menyusun peraturan perundang-undangan dalam bernegara. Semua norma peraturan hendaklah merujuk dan menyarikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari filosofi. Pancasila menjadi standar nilai bagi semua nilai norma peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Pada jalur hukum, pemikiran tentang pancasila difokuskan pada kedudukannya

sebagai gubernur, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ini bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusi pendapatan yang merata. Demikian pula pertumbuhan sosial yang dapat dilihat dari IPM.

Akhir semua itu, masyarakat tidak hanya sekadar melihat keberhasilan di masa lalu, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan calon pemimpin untuk mengatasi tantangan masa depan, menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Dalam proses ini, penilaian kritis, partisipasi aktif, dan diskusi yang sehat adalah faktor penting dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2014). *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Alfabeta.
- Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2023). Keberlanjutan Demokrasi Indonesia? Dua Tahun Pandemi COVID-19 yang Penuh Tantangan. *International Journal of Demos*, 5(2), 212-232.
- Anindya, C. R., Chen, J., Dinarto, D., Guild, J., Hasyim, S., Lundry, C., Nubowo, A., Marzuki, K., Primarizki, A., Tiola, & Wanto, A. (2021). The 2018 and 2019 Indonesian Elections: Identity Politics and Regional Perspectives. In L. C. Sebastian & A. R. Arifianto (Eds.), *The 2018 and 2019 Indonesian Elections: Identity Politics and Regional Perspectives*. Routledge.
- Aswar, K. (2019). Financial Performance of Local Governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6). <https://doi.org/10.24018/EJBMR.2019.4.6.164>
- Bolden, R. (2010). Leadership, Management and Organisational Development. In J. Gold, R. Thorpe, & A. Mumford (Eds.), *Handbook of Leadership and Management Development* (pp. 1-12). Gower.

- Capello, R. (2019). Space, Growth and Development: A Historical Perspective and Recent Advances. In R. Capello & P. Nijkamp (Eds.), *Handbook of Regional Growth and Development Theories* (pp. 24–47). Edward Elgar Publishing.
- Donaghy, K. P. (2019). Regional Growth and Trade in the New Economic Geography and Other Recent Theories. In R. Capello & P. Nijkamp (Eds.), *Handbook of Regional Growth and Development Theories* (pp. 62–90). Edward Elgar Publishing.
- Faggian, A., Modrego, F., & McCann, P. (2019). Human Capital and Regional Development. In R. Capello & P. Nijkamp (Eds.), *Handbook of Regional Growth and Development Theories* (pp. 149–171). Edward Elgar Publishing.
- Fitriyah, K., Kantun, S., & Sukidin. (2019). The strategy of the women's leadership (a case study of the head village in Puger Subdistrict). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/243/1/012088>
- Hassink, R., Isaksen, A., & Trippel, M. (2019). Towards a comprehensive understanding of new regional industrial path development. *Regional Studies*, 53(11), 1636–1645. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1566704>
- Jackson, E., Purnawati, E. B., & Shaxson, L. (2018). How and When Do Policymakers Use Evidence? Taking Politics Into Account. In A. Pellini, B. Prasetyamartati, K. Nugroho, E. Jackson, & F. Carden (Eds.), *Knowledge, Politics and Policymaking in Indonesia* (pp. 67–88). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0167-4_5/COVER
- Klarin, T. (2018). The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. *Zagreb International Review of Economics and Business*, 21(1), 67–94. <https://doi.org/10.2478/zireb-2018-0005>
- Machmud, M., Irawan, B., Karinda, K., Susilo, J., & Salahudin. (2021). Analysis of the intensity of communication and

- coordination of government officials on twitter social media during the Covid-19 handling in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(3), 319-334. <https://doi.org/10.36941/AJIS-2021-0087>
- Malizia, E., Feser, E., Renski, H., & Drucker, J. (2021). *Understanding Local Economic Development*. Routledge.
- Maryunani, S. R. (2019). The Making of Creative City: Bandung and Its Creative Industry Ecosystem. In *University of London*.
- Moldoveanu, M., & Narayandas, D. (2019). The Future of Leadership Development. *Harvard Business School*, 2-10.
- Nguyen, T. T., Mia, L., Winata, L., & Chong, V. K. (2017). Effect of transformational-leadership style and management control system on managerial performance. *Journal of Business Research*, 70, 202-213. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.018>
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307-338. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>
- Slater, D. (2022). Asia's Elusive Northeast Passage. *East Asia Forum Quarterly*, 14(1), 14-18.
- Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2006). *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy* (2nd ed.). Springer.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97-112. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>
- Weiss, M., Kolbe, M., Grote, G., Spahn, D. R., & Grande, B. (2018). We can do it! Inclusive leader language promotes voice behavior in multi-professional teams. *Leadership Quarterly*, 29(3), 389-402.

<https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.09.002>

Yaya, O. S., Furuoka, F., Pui, K. L., Jacob, R. I., & Ezeoke, C. M. (2020). Investigating Asian Regional Income Converge Using Fourier Unit Root test With Break. *International Economics*, 161, 120–129. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.12.002>

Demokrasi, Kepemimpinan dan Pemerintahan Indonesia Era Digital

Oleh. R. Siti Zuhro



A. Pendahuluan

Pasca gerakan reformasi 1998, Indonesia memasuki era kehidupan kebangsaan yang demokratis dan terbuka. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, capaian Indonesia tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat internasional. Meskipun demikian, demokrasi yang berlangsung selama 25 tahun ini (1998-2023) belum juga mampu membuat Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Secara politik masih banyak yang harus dibenahi, khususnya berkaitan dengan etika dan moral politik pemimpinnya.⁵⁶ Nilai-nilai budaya politik yang berkembang di tengah masyarakat belum mampu menjadi penopang utama praktek demokrasi. Salah satu sebab utamanya adalah absennya nilai-nilai keteladanan dan atau kepemimpinan⁵⁷ yang bisa menginsiparasi dan mendorong perilaku politik masyarakat yang positif dan dewasa atau matang.

Demokrasi tanpa penegakan hukum dan keteladanan pemimpin berpotensi menimbulkan anarki, tirani, feodalisme, dan oligarki politik (Zuhro, 2014). Keteladanan pemimpin dalam menegakkan etika dan moral merupakan sebuah keniscayaan. Nilai-nilai demokrasi Pancasila secara jelas mengajarkan hal

⁵⁶ Lihat antara lain buku MIPI tentang Etika Pemerintahan (2023). Jakarta.

⁵⁷ Kepemimpinan adalah suatu proses transformasi perubahan di mana etika individu menyatu dengan masyarakat banyak sebagai *evolutionary social development*. Karena itu, kepemimpinan merupakan suatu proses perubahan dinamis dan pertukaran nilai-nilai.

Daftar Pustaka

- Antlov, Hans. (1994). *Leadership on Java*. Routledge.
- Feith, Herbert. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Lukas Luwarso (ed.). (2008). *Menjaga Kebebasan Pers. 70 Tahun Atmakusumah*. Jakarta: LPDS.
- Labolo, Muhadam (ed.) (2023). *Etika Pemerintahan*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
- Prasojo, Eko (2005). *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance*. Depok: FISIP UI.
- Prasojo, Eko (2020). 'Birokrasi Digital dalam Eksistensi dan Transformasi Administrasi Publik'. Kuliah Dosen Tamu yang diselenggarakan Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) UMRAH, Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
- Taufiqurokhman, Ismail Suardi Wekke dan Andriansyah (2022). *Kepemimpinan Transformatif dan Progresif*. Jakarta: CV Adanu Abimata.
- Zuhro, R. Siti. (1999), *Pergulatan Partai Politik dan Demokratisasi di Masa Krisis: Perspektif Perbandingan*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan (PPW)-LIPI.
- Zuhro, R. Siti. (2007). *Profesionalitas dan Netralitas Birokrasi: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah*, Jakarta: The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation.
- Zuhro, R. Siti. (2008). *Demokrasi dan Globalisasi: Meretas Jalan Kejatidirian*. Jakarta: PT THC Mandiri.
- Zuhro, R. Siti. (2008). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Zuhro, R. Siti. (2009). *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Zuhro, R. Siti. (2010). *Good Governance dan Reformasi Birokrasi, Jurnal Penelitian Politik (LIPI)*, Vol. 7, No. 1.
- Zuhro, R. Siti. (2011). Praktik Demokrasi di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, edisi 35.
- Zuhro, R. Siti. (2011). Model Demokrasi Lokal. Jakarta: PT THC Mandiri, 2011.
- Zuhro, R. Siti. (2012). Birokrasi dan Politik di Indonesia: Relasi Birokrasi, Politik dan Masyarakat', *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 3 No. 2.
- Zuhro, R. Siti. (2013). 'Permasalahan Kepemimpinan Politik Lokal dan Nasional', makalah disampaikan dalam Seminar Refleksi Akhir Tahun Bidang Politik dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, 10 Desember.
- Zuhro, R. Siti. (2013). 'Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan', makalah dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan Kesbang Politik Kemendagri, Makassar, 1 Oktober.
- Zuhro, R. Siti. (2013). 'Peran Serta Media Massa dalam Menyukkseskan Pemilu 2014', makalah yang disampaikan dalam FGD 'Peranan Media Massa dalam Rangka Menyukkseskan Pemilu 2014', diselenggarakan Deputi Politik dan Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden, 21 Februari.
- Zuhro, R. Siti. (2014). 'Pentingnya Nilai-Nilai Budaya Lokal, Peran Aktor dan Institusi Demokrasi dalam membangun Demokrasi yang Sehat, Beradab dan Berkualitas', dalam Dialog 'Membangun Sistem Demokrasi Indonesia', yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI, Jakarta, 14 Agustus.
- Zuhro, R. Siti. (2014). 'Membangun Kepemimpinan yang Kuat dan Berkarakter', makalah dipresentasikan dalam RTD Pengembangan Hanjar Kursus Singkat Manajemen

Pertahanan Negara, yang diselenggarakan oleh Kemhan, Jakarta, 29 Oktober 2014.

- Zuhro, R. Siti. (2014). 'Membaca Sepak Terjang Partai Politik dan Implikasinya', makalah dipresentasikan dalam FGD Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan: Peningkatan Kualitas Kader Pemimpin Nasional Melalui Kaderisasi Partai Politik, diselenggarakan Menkopolkam RI, Jakarta, 18 November.
- Zuhro, R. Siti. (2014). Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional Era Reformasi, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 46.
- Zuhro, R. Siti. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019, *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 16, No. 1, Juni 2019.
- Zuhro, R. Siti. (2021). Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkualitas dan Berintegritas, *Jurnal Bawaslu*,

Kepemimpinan Pemerintahan Berbasis *Artificial Intelligence*

Oleh. Kiyokata Yokomichi dan
Laode Buzyali Fajman Sanbigs



A. Pendahuluan

Dalam era revolusi digital, teknologi informasi merupakan variabel dominan yang telah merubah pola kepemimpinan di berbagai negara tak terkecuali Indonesia. Signifikansi variabel tersebut nampak jelas pada perubahan perilaku dari para pemimpin. Romantisme keduanya bermula sejak ponsel pintar dibarengi mudahnya akses internet mulai merebut perhatian dan mengalihkan dunia masyarakat yang dipimpin. Statistik menunjukkan bahwa jumlah pengguna ponsel saat ini adalah sebanyak kurang lebih enam miliar pengguna atau sekitar 80% dari total populasi dunia dan telah merenggut waktu pemakainya hingga sekitar 4,2 jam per hari atau bahkan sekitar 8-10 jam perhari untuk wilayah Indonesia.⁷⁵ Hal ini menyebabkan interaksi di dunia nyata menjadi semakin berkurang dari waktu ke waktu. Fenomena tersebut tentu berpengaruh besar pada preferensi masyarakat terhadap jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah. Pelayanan konvensional yang memakan waktu berjam-jam menjadi tidak relevan dengan waktu individu yang semakin terbatas. Jika kita asumsikan warga Indonesia menghabiskan waktunya hingga 8 jam bermain *handphone*, 8 jam untuk tidur, maka hanya tersisa sekitar 8 jam perhari untuk melakukan aktivitas kantor, olahraga, dan lainnya, sehingga kebutuhan akan layanan cepat saji semakin tak terbantahkan. Hal inilah yang kemudian

⁷⁵<https://ameera.republika.co.id/berita/rvpgp425/ratarata-orang-indonesia-habiskan-810-jam-per-hari-pakai-hp>

pendekatan etis dalam penerapan AI dalam kepemimpinan pemerintahan. Ini mencakup aspek-aspek seperti privasi data, keamanan, bias algoritma, dan pertimbangan dampak sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan AI didasarkan pada prinsip-prinsip etis, transparansi, dan keadilan guna melindungi kepentingan masyarakat yang dilayani. Dalam konteks yang lebih luas, sudah menjadi kodrat manusai untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, AI tak akan pernah mengambil posisi manusia, justru sebaliknya, satu hal yang perlu ditakutkan adalah bahwa posisi manusia akan diambil oleh sesama manusia yang paham bagaimana menggunakan AI.

Daftar Pustaka

- Barry Eichengreen, et al. 2013. *Growth Slowdowns Redux: New Evidence On The Middle-Income Trap*. National Bureau Of Economic Research.
- Dewi, IGA Gangga Santi. 2019. "Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bal." *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* Vol. 4 No. 1.
- Hidayati, Festy Rahma. 2021. 147.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Nindita, Rizky Dhea. 2021. *Analisis Dampak Reklamasi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir di Kalibaru Cilincing Jakarta Utara*. Jakarta: Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
- Nurmillah, Aminah. 2021. "Artikel DJKN, Kementerian Keuangan." *Indonesia Maju 2045: Kenyataan atau Fatamorgana*, Maret 22.
- R. Madan & M. Ashok. 2022. "A public values perspective on the application of artificial intelligence in government practices: A synthesis of case studies." *Handbook of research on artificial intelligence in government practices and processes* pp. 162-189.
- Rahmah, Syifaur. 2021. 95.

Vanhaelen, Quentin, et al. 2018. "Artificial Intelligence for Aging and Longevity Research: Recent Advances and Perspectives."

<https://www.researchgate.net/publication/329143594>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/09/114-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sejak-2004-2019>

<https://www.weforum.org/agenda/2018/09/artificial-intelligence-shaking-up-job-market/>

<https://money.kompas.com/read/2023/03/20/193607826/pemborosan-anggaran-ada-27000-aplikasi-milik-pemerintah-lewat-vendor?page=all>

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2010-2020-1591171544>

Relevansi Kelembagaan Partai Politik Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah

Oleh. Ferry Daud Liando



A. Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah telah diimplementasikan sejak tahun 1999 melalui pembentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan salah satu hasil dari perjuangan gerakan reformasi mahasiswa dan elemen aktivis organisasi kemasyarakatan tahun 1998. Gerakan itu kemudian menggantikan kekuasaan era pemerintahan orde baru yang berkuasa selama 32 tahun. Kebijakan otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengelola secara mandiri guna pembangunan dan kesejahteraan daerahnya. Walaupun terdapat beberapa kewenangan absolut yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat seperti politik dan hubungan luar negeri, fiskal, hukum dan peradilan, agama serta keamanan dan ketertiban.

Kebijakan yang selenggarakan oleh pemerintahan orde baru menempatkan posisi pemerintah pusat sebagai arena sentral pengambilan keputusan serta mengeksekusi sendiri keputusan yang ditetapkannya. Sebelumnya pemerintah daerah hanya diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan. Berbeda dengan sistem pemerintahan orde baru, kebijakan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah secara mandiri merumuskan kebijakan untuk sejumlah urusan namun tetap dalam koridor bingkai negara kesatuan. Oleh karena itu undang-undang otonomi daerah mengatur gubernur memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai kepala daerah dengan menjalankan tugas desentralisasi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang menjalankan tugas dekonsentrasi.

Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Pemimpin Pemerintahan yang Berkualitas

Oleh. Juanda



A. Pendahuluan

Eksistensi Partai Politik dalam negara demokrasi sangat penting dan memiliki peran yang sangat strategis. Indonesia sebagai negara demokrasi secara filosofis telah tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan secara konstitusional dirumuskan di dalam Pasal-Pasalnya. Beberapa norma konstitusional yang mendeskripsikan Indonesia negara demokrasi antara lain terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya di dalam Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum sebagaimana dimaksud, di atur dalam Pasal 22 E yang menegaskan bahwa anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum.

Di tingkat Daerah, salah satu prinsip dan esensi demokrasi diatur di dalam Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jika ditelaah dan dikaji lebih cermat dan mendalam, pengaturan prinsip dan esensi negara demokrasi dan kedaulatan rakyat tersebar di berbagai Pasal di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.

teori-teori konstruksi identitas nasional, seperti yang diemban oleh Clifford Geertz dan Stuart Hall, dapat menjadi panduan penting. Dengan memahami peran budaya dan pentingnya interpretasi yang akurat serta partisipasi aktif dalam pembentukan identitas nasional, pemerintahan Jokowi dapat terus memperkuat konstruksi identitas nasional yang inklusif dan pluralistik, yang mencerminkan semangat kebhinekaan Indonesia.

Dengan demikian, melalui pemahaman dan analisis yang mendalam terhadap pandangan filsafat budaya dan teori konstruksi identitas nasional, kita dapat mengevaluasi dengan kritis upaya pemerintahan Jokowi dalam membangun konstruksi identitas nasional yang inklusif dan pluralistik. Dengan mempertimbangkan teori-teori konstruksi identitas nasional seperti Anthony D. Smith, Clifford Geertz, Stuart Hall, dan Berger & Luckmann guna mendapatkan wawasan penting yang lebih komprehensif, tentang konstruksi identitas nasional di masa pemerintahan Jokowi dan implikasinya terhadap inklusivitas dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia.

Referensi

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.
- Dewi, I. G. (2019). *Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali*. *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Basic Books.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications.
- Nindita, R. D. (2021). *Analisis Dampak Reklamasi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pesisir di Kalibaru Cilincing Jakarta Utara*. Jakarta: Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
- Smith, A. D. (1991). *National Identity*. University of Nevada Press.

Pengembangan Kepemimpinan Transformasional di Level Lokal pada Era New Normal

Oleh. Petrus Polyando



A. Pengantar

Aspek kepemimpinan pemerintahan menjadi faktor penting dalam transformasi manajemen pemerintahan daerah di era new normal. Hal ini mengingat berbagai gagasan konseptual mengenai tata kelola daerah dan cara mengelola berbagai sumber daya daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sangat ditentukan oleh pemimpin pemerintahan daerah. Dengan posisinya sebagai aktor dominan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah yang didukung dengan berbagai fasilitas, publik meletakkan organ ini sebagai elemen kunci keberhasilan atas berbagai gagasan perwujudan kesejahteraan masyarakat lokal. Tentu masih konsisten dengan nilai utama kepemimpinan pemerintahan yang telah disepakati sejak zaman klasik hingga zaman modern atau post-modern. Dalam artian bahwa sejak ditemukannya entitas pemerintahan sebagai komponen penting bagi sebuah negara, faktor kepemimpinan masih menjadi harapan keberkahan bagi para pengikut. Dapat disederhanakan bahwa kepemimpinan pemerintahan lokal sangat menentukan dampak positif dan negatif dari berbagai perubahan sosial di wilayahnya pada setiap situasi dan kondisi. Sebab itu, bagi mereka yang memperbaharui diri akan mampu menghadapi perubahan zaman sedangkan bagi mereka yang bertahan dengan gaya tradisional akan kesulitan.

Saat ini dunia terus berubah dan sifat perubahannya telah menghadirkan situasi baru dalam tatanan dunia di mana ancaman cepat menyebar dan tidak pasti, di mana konflik kian nyata terjadi namun tidak dapat diprediksi, dan di mana

Daftar Pustaka

- Argyris, C. dan Schön, D. (1996). *Organisational learning II: Theory, Method, and Practice*. New York: Addison-Wesley.
- Avolio, B. J. & B. M. Bass (1985) *Transformational Leadership, Charisma, and Beyond.*" Working paper, School of Management, State University of New York, Binghamton, 1985, p. 14.
- Bernard M. Bass & Bruce J. Avolio (1994) *Transformational Leadership And Organizational Culture*, *International Journal of Public Administration*, 17:3-4, 541-554, DOI: 10.1080/01900699408524907
- Burns, James M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Casserly, T. and Crtichley, B. (2010), *Perennial philosophy (sustainable leadership)*, *People Management*, August, pp. 20-4.
- Downton, J. V. (1973). *Rebel leadership: Commitment and charisma in the revolutionary process*. New York: The Free Press.
- Graham, Pauline, ed. 2003. *Mary Parker Follett – Prophet of Management: A Celebration of Writings from the 1920s*. Cambridge, MA: Harvard Business School Press.
- Geib, P., & Swenson, J. (2013). *China: Transformational Leadership for Policy and Product Innovation*. *Advances in Management*, 6(5), 3-10.
- Hanh, Thich Nath, 2007, *The Art of Power*, New York: Harper One, 2007, p. 34.
- Hoffman, B. J., Bynum, B. H., Piccolo, R. F., & Sutton, A. W. (2011). *Person-organization value congruence: How transformational leaders influence work group effectiveness*. *Academy of Management Journal*, 54(4), 779-796.
- Kadek Hemamalini, (2019), *Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Perspektif Ajaran Hindu*, *Dharma Duta: Jurnal Penerangan Agama Hindu*, Hindu,

<https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/Dharma-duta>, e-
ISSN : 2685-9521 p-ISSN : 2089-8215

- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mack, Oliver, Anshuman Khare, Andreas Krämer, and Thomas Burgartz. (2016) *Managing in a VUCA World*. Cham: Springer International Publishing.
- Moertono, Soemarsaid (1985) *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Morse, Ricardo S. & Terry F. Buss, (2007) *The Transformation of Public Leadership in Transforming Public Leadership for the 21st Century*, National Academy of Public Administration, M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England.
- Murphy, L. (2005). *Transformational leadership: A cascading chain reaction*. *Journal of Nursing Management*, 13(2), 128-136.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2934.2005.00458.x>
- Ndraha, Taliziduhu. (2009) *GBPP Kybernologi dan Kepamongprajaan*, Sirao Credentia Center, Tangerang.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1939) *Baoesastra Djawa*. Batavia: Penerbit J.B. Wolters Wijaya, IKB
- Roderick RM (ed) (1998) *Strategic Leadership Primer*. U.S. Army War College, Carlisle Barracks
- Setyo Wibowo, A & Haryanto Cahyadi (2014) *Mendidik Pemimpin dan Negarawan*, Penerbit Lamalera Yogyakarta
- Warrick, D. D. (2011). *The Urgent Need for Skilled Transformational Leaders: Integrating Transformational Leadership and Organization Development*. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, 8(5), 11-26.
- Yani, M., & Yani, M. (2021). Konsep Dasar Karakteristik Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam. *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 157-169. Retrieved from

[https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/Alhikmah/article
/view/166](https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/Alhikmah/article/view/166)

Yarger HR (2006) *Strategic theory for the 21st century: the little book on
big strategy*. DIANE, Darby

Retorika dan Model Komunikasi Kepemimpinan Pemerintahan

Oleh. Lely Arrianie



A. Pendahuluan

Propaganda seringkali dikonotasikan dengan sesuatu yang bersifat negatif, padahal sejatinya propaganda bisa diarahkan pada sesuatu yang bersifat positif. Tindakan komunikasi kepemimpinan pemerintahanpun dapat menggunakan propaganda untuk sebuah langkah dalam menentukan model komunikasi apa yang akan digunakan untuk membangun kepercayaan publik atas kepemimpinan pemerintahan yang tengah berlangsung. Karena itu propaganda harus dipandang sebagai suatu usaha yang dilakukan pemerintah dalam kepemimpinan pemerintahannya, bisa juga sebagai suatu usaha yang dirancang dengan cermat, sadar, sistematis, tersusun dengan rapi dan terorganisir untuk mencapai tujuan bersama.

Namun, realitasnya dalam banyak kekuasaan termasuk dalam kepemimpinan di pemerintahan, tidak mudah menemukan model komunikasi kepemimpinan pemerintahan, mengingat persepsi yang tidak sama bagi pemimpin itu sendiri maupun aparat birokrasi di dalamnya, bahkan cara menterjemahkan aturan yang seharusnya dipahami samapun realitasnya tidak ditemukan model yang bisa menjadi referensi umum sebagai sebuah model, sehingga menemukan model khas komunikasi kepemimpinan pemerintahan harusnya menjadi tanggung jawab oleh jajaran pemimpin yang tengah melaksanakan kekuasaannya termasuk aparat birokrasi dibawahnya secara keseluruhan.

Setiap pemimpin dalam suatu pemerintahan dalam menjalankan kepemimpinannya, pasti melakukan, merancang dan mengorganisir secara terukur, cermat dan sistematis tiap

D. Penutup

Sifat Komunikasi kepemimpinan pemerintahan harus dibangun diatas narasi bersama bahwa kepemimpinan pemerintahan itu adalah tentang membangun narasi bersama untuk kepentingan publik, maka sifat komunikasi *one to many communication* harus memberikan ruang gerak diantara orang-orang yang merasa sebagai anggota dari suatu kelompok untuk bisa sama-sama melakukan propaganda dalam bentuk persuasi sebagai kontrol sosial, kepemimpinan pemerintahan adalah sebuah upaya membangun sistem komunikasi yang bisa dipolakan dan dijadikan model kepemimpinan pemerintahan dalam berbagai level kekuasaan dan kepemimpinan yang dijalankan.

Referensi

- Arrianie, Lely , 2022, *Teori, Model, Perspektif dan Media dalam KOMUNIKASI POLITIK* , Jakarta, Penerbit Buku KOMPASS (PBK),
- , 2010. *KOMUNIKASI POLITIK , Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik* , Bandung Widya Padjadjaran .
- , 2022. Indonesian Politician From One Stage to Another , International Kournal of Advanced multidisciplinary, Greenation,
- Apel, Karl-Otto 1981, *Charles S Peirce From Pragmatism to Pragmatism*, Massachusetts University of Massachusetts,.
- Goffman, Erving , 1959, *The Presentation of Self in Everiday Life* , Harmondsworth, Penguin Books.
- Golding, Peter, Murdock, Graham & Schlesinger, Philip (eds), 1986, *Communicating Politics: Mass Communication and the Political Process* , Leicester , Leicester University Pers.
- Horle, Reinhold Friedrich Alfred, 1952, *Studies in Filosophy*, Harvard , Harvard University Pres,

- Habermas, Jürgen, 1984, *The Theory of Communicative Action*, by Thomas Mc Carthy, Boston, Beacon Press, .
- Magnis, Frans suseno, 1990, “ *Pengantar dalam Jürgen dan Habermas, Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*. Terj. Hasan Basari, Jakarta, LP3ES
- , *Etika Politik*, Jakarta, PT Gramedia pustaka Utama , .
- Mulyana, Deddy , 2023, *Komunikasi Suatu Pengantar (Cetakan ke 24)*, Bandung ,Remaja Rosdakaya
- Sumaryono, E, 1996, *Hermeneutik sebuah metode Filsafat*, Yogyakarta Kanisius
- Thomson, John B, 1983, *Critical Hermeneutics A study Thought of Paul Ricoeur and Jürgen Habermas*, Cambridge , Cambridge University Press,

Iklm Komunikasi Organisasi Dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Oleh. Dyaloka Puspita Ningrum



A. Reformasi Sebagai Pengantar

Berbicara mengenai persoalan politik tentu menjadi topik yang mengasyikan untuk dibahas dalam obrolan sehari-hari, baik di ruang publik maupun di warung kopi sekalipun. Mengulik dinamika politik pemerintahan di tanah air sungguh tidak lepas dari proses demokrasi yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah demokrasi mulanya muncul dalam peradaban ke-V Yunani sebelum masehi. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuatan), yang juga secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan rakyat. Bahkan definisi demokrasi yang paling familiar didengar yakni berdasarkan pandangan Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln, bahwa “demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Namun situasi kongkrit yang ada perlahan-lahan mengantarkan masyarakat pada rasa sinis ataupun pesimis akan keberhasilan negeri ini, terutama terhadap integritas pemerintah itu sendiri yang penuh dengan narasi kericuhan, perebutan kekuasaan serta pertentangan / *conflict of interest*. Stigma politik sering kali dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk, kotor dan penuh intrik. Dalam tataran praktis, kekuasaan dan juga relasi yang dimiliki politisi memungkinkan adanya praktik politik yang mengarah pada *abuse of power*, sehingga tidak menutup kemungkinan akan memunculkan kebijakan politik yang kian merugikan masyarakat.

Diibaratkan air panas, secara keseluruhan paradigma masyarakat di negeri ini memang telah berada di titik kejenuhan dalam menyikapi sejumlah situasi politik yang cukup tumpang tindih dengan berbagai program, kegiatan hingga bisnis dalam birokrasi kenegaraan tersebut. Meskipun masyarakat juga menaruh besar harapan tentang masa depan yang lebih adil dan makmur pada pemerintah yang berkuasa. Sehingga dalam memaknai dinamika perpolitikan tanah air yang terus bergulir dan bahkan dalam menyambut Pesta Demokrasi ke-5 pada tahun 2024 mendatang, keterdapat pula fenomena unik lainnya yang cukup banyak menghiasi media online publik saat ini, yaitu dalam hal "humor politik". Ruang politik yang kadang pengap dan rumit, sebenarnya sangat penting di isi dengan adanya humor tersebut. Walaupun sejumlah kritikan pedas terhadap para elit pemerintah kerab kali dilontorkan oleh publik, yang di sisi lain pun sejujurnya berangkat juga dari gaya hidup para aktor politik itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku :

- Cangara, H. (2011). *Komunikasi politik konsep, teori dan strategi*.
- Fuady, M., & Gunarsa, A. (2010). *Konsep negara demokrasi*. Refika Aditama.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hutchcroft, P, 2014, *Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy*. Baltimore : Johns Hopkins University.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.
- McQuail, Denis, 2011, *Teori Komunikasi Massa*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Meyer, Thomas. 2002. *Media Democracy: How Media Colonized Politics?*. Cambridge: Polity Press.

- Robbins, S. P. dan Coulter, M. (2007). *Manajemen* (1st ed.). PT Indeks.
- Winters, J. A. (2014). Oligarchy and democracy in Indonesia. In *Beyond Oligarchy* (pp. 11-34). Cornell University Press.
- Young, M. (2011). *The rise of the meritocracy* (Vol. 1). Transaction Publishers.

Jurnal :

- Dahlia, R. R., & Permana, P. A. (2022). Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(1), 65-81.
- Dunan, A. (2020). Komunikasi Pemerintah di Era Digital: Hubungan Masyarakat dan Demokrasi Government Communications in Digital Era: Public Relation and Democracy. *Jurnal Pekommas*, 5(1), 73-82.
- Fauzi, A., & Sarwititi, S. (2014). Pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja aparatur di Pemerintahan Desa. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 124134.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91-104.
- Kent, M. L. (2013). Using social media dialogically: Public relations role in reviving democracy. *Public Relations Review*, 39(4), 337-345. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2013.07.024>.
- Rufita, D., Setiawati, B., & Suparti, H. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Lihat Dari Partisipasi Buah Pikiran Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 2(2), 522-537.
- Sucahya, M. (2013). Ruang publik dan ekonomi politik media. *Jurnal Komunikasi*, 2(3), 15-23.

Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).

Artikel :

Remotivi. 2012.Indonesia Lawyers Club : Kolonisasi Logika Televisi dalam Logika Politik.
<https://www.remotivi.or.id/headline/esai/156>.

Tempo. (2021). Bagaimana Cara Oligarki Berkonsolidasi Membajak Demokrasi Di Indonesia.
<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/467273/bagaimana-cara-oligarki-berkonsolidasi-membajak-demokrasi-di-indonesia>.

Tempo. (2021). Di Balik Merosotnya Indikator Demokrasi Di Indonesia. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/467275/di-balik-merosotnya-indikator-demokrasi-di-indonesia>.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.

Branding Komunikasi Politik Media Sosial Instagram
Oleh Calon Pemimpin Muda
Menuju Kontestasi Pemilu 2024 di Bengkulu
Oleh. Lisa Adhrianti



A. Pendahuluan

Istilah *brand* atau merek umumnya digunakan untuk merujuk kepada penamaan atas sebuah produk atau usaha yang diidentikkan dengan konsep-konsep ekonomi. Seiring berjalannya waktu diskusi brand kemudian diarahkan pada pembentukan citra personal, terlebih dalam konteks dunia politik kita mendapatkan contoh dari Barack Obama yang berasal dari ras kulit hitam yang mampu memenangkan kontestasi pemilu Presiden Amerika Serikat dengan melakukan mobilisasi massa melalui platform digital media sosial Facebook di tahun 2008 silam. Kemenangan tersebut membuka ruang kajian lebih luas terhadap konsep *personal branding* bagi komunikator politik yang ternyata dapat dibentuk dan dipertahankan melalui pemanfaatan teknologi digital dengan memaksimalkan media sosial saat ini.

Komunikasi politik yang merupakan proses keterlibatan aktor politik bersama dengan pesan politik yang dibawa terkait dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah menjadi menarik ketika dihadapkan kepada arena kompetisi untuk memperebutkan kursi atau kedudukan khusus di masyarakat. Komunikasi politik tidak akan pernah berhenti berjalan selama pemerintahan berlangsung di muka bumi. Panggung kontestasi politik yang berlangsung setiap kurun waktu tertentu di Indonesia diisi dengan berbagai tontonan yang berlomba untuk menciptakan kesan personal yang menarik dari aktor politik di hadapan masyarakat. Inilah yang menjadi esensi kajian personal branding.

Bupati yang sudah terlihat sebagai upaya membedakan diri dengan pribadi lainnya.

Pengelolaan brand (*Manage Your Brand*) yang terkait dengan kemampuan memberikan kepercayaan ke dalam benak setiap konsumen telah dilakukan oleh keempat pemimpin daerah. Aspek mengelola dan memelihara brand ini ditunjukkan dengan respon publik yang ditunjukkan oleh jumlah *like* dan *comment* yang diberikan oleh para pengikut.

Saran

Secara teoritis dapat disarankan bahwa pengembangan kajian branding politik dapat lebih maksimal jika ditunjang dengan hasil survey menggunakan metodologi campuran kualitatif dan kuantitatif berlatar belakang teori komunikasi politik perspektif pemasaran.

Secara praktis, disarankan kepada pemimpin daerah yang akan mengikuti kontestasi politik lanjutan agar dapat aktif memaksimalkan kampanye pengembangan citra atau personal branding di media sosial selain Instagram, namun juga melalui facebook, twitter, tiktok, youtube yang rata-rata digunakan oleh masyarakat saat ini. Branding politik melalui media sosial juga harus dapat memunculkan karakter spesifik yang konsisten agar publik dapat semakin ingat terhadap tokoh politik, menjadi suka dan mau menjadi pemilih pada panggung pemilihan umum.

Daftar Pustaka

- Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, Vol 8 No 1, hal. 91- 101.
- Effendy, O.U. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayati, Festy Rahma. (2021). Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 5, 2 (2021) 145-161 ISSN 2579-8332 (Online) | <http://u.lipi.go.id/1487661056>, hal. 145-161.

- Kaplan, A, & Haenlein, M. (2010). Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, Vol 53 No 1, hal. 59–68.
- Kemp S., Digital 2021: Indonesia, 2021, <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>.
- Manon Metz, Sanne Kruikemeier & Sophie Lecheler (2020) Personalization of politics on Facebook: examining the content and effects of professional, emotional and private self- personalization, *Information, Communication & Society*, 23:10, 1481-1498, DOI: 10.1080/1369118X.2019.1581244
- Margaret Scammell (2015) Politics and Image: The Conceptual Value of Branding, *Journal of Political Marketing*, 14:1-2, 7-18, DOI: 10.1080/15377857.2014.990829 McNair,
- Petruca, I. (2016). Personal Branding Through Social Media. *International Journal of Communication Research*, Vol 6 No 4, hal. 389–392. doi: 10.4018/978-1-4666-9593-1.les4
- Rahmah, Syifaur. (2021). Personal Branding Ganjar Pranowo untuk Membangun Komunikasi Politik di Media Sosial Instagram. *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 5. No. 1, Januari 2021, hlm 94 -101 Doi: 10.30596/interaksi.v5i1.5584, hal.94-101.
- Rangkuti, F. (2013). *Strategi Semut Melawan Gajah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. *Jurnal ASPIKOM*, Vol 3 No 3, hal. 379.

Menata Ulang Rekrutmen Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Oleh. Muhadam Labolo



A. Pengantar

Realitas kepemimpinan pemerintahan Indonesia dalam dua dasawarsa pasca reformasi tak banyak mengalami perubahan signifikan. Kepemimpinan pemerintahan dalam hal ini melingkupi kepemimpinan pemerintahan pada organisasi sosial politik, dan kepemimpinan pemerintahan pada organisasi birokrasi pemerintahan (Wasistiono, 2009). Proses rekrutmen kepemimpinan pemerintahan dimasa orde lama dan orde baru tampak jauh lebih terencana dengan sumber daya melimpah. Dimasa orde lama, proses pengisian kepemimpinan pemerintahan walaupun tak begitu stabil namun para pemimpin memiliki kredibilitas tinggi sebagai produk pergolakan panjang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah (1908-1965). Sementara dimasa orde baru, proses pengisian kepemimpinan pemerintahan berjalan stabil menurut senioritas dan *merit system*. Baik pengisian kepemimpinan politik maupun birokrasi dilakukan secara ketat oleh kaum teknokrasi. Di akhir kepemimpinan Soeharto (1966-1998), proses kepemimpinan mulai bercampur *spoil system*. Pasca reformasi, pola penyiapan kepemimpinan pemerintahan dilakukan dengan mempertahankan *merit system*. Namun demikian upaya itu tak bertahan lama, proses rekrutmen kepemimpinan baik di ranah organisasi sosial-politik maupun birokrasi-pemerintahan cenderung kembali ke masa orde baru, dibumbui korupsi, kolusi dan nepotisme (1999-2023). Kritik terhadap kegagalan rekrutmen masa orde baru yang dipenuhi bantalan korupsi, kolusi dan nepotisme menjadikan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia jauh lebih mudah di tebak dibanding praktek

Daftar Pustaka

- Bahaudin Taufik (2001), *Brainware Management Generasi Kelima Managemen Manusia*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta
- Barzelay (2001), *The New Public Management Improving Research And Policy Dialog*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles and London
- Bennis Warren and Mische Michael (1999), *The 21st Century Organization: Reinventing Thought Reengineering* (Terjemahan: Irma Andriani Rahmayanti), PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
- Bennis Warren and Townsend Robert (1998), *Reinventing Leadership* (Terjemahan Clara Suwendo), Interaksa, Jakarta
- Hiil B. Larry (1992), *The State Of Public Bureaucracy*, M.E. Sharpe, Inc, Armonk New York, London England
- Hughes E. Owen (1994), *Public Management and Administration An Introduction*, ST. Martin's Press, New York
- Ingstrup Ole and Crookall Paul (1998), *The Three Pillars of Public Management Secrets of Sustained Success*, Canada
- Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (2007), *Reformasi Birokrasi Membangun Pelayanan Prima Menuju Terciptanya Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa*, Jakarta
- OTT Steven. J, Hyde C. Albert, Shafritz M. Jay (1991), *Public Management The Essential Reading*, Nellson Hall Inc, Chicago, Illinois
- Thoha Mifthah (1999), *Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, LAN, Jakarta
- Thoha Mifthah, Darma Agus (ED) (1999), *Menyoal Birokrasi Publik*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sapta Mirwandar, Ibrahim Tadju (1992), *Birokrasi dan Administrasi Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Zauhar Soesilo (1996), *Reformasi Administrasi, Konsep, Dimensi dan Strategi*, Bumi Aksara, Jakarta

Jurnal:

Persadi, *Administrasi dan Pembangunan*, Vol 1, No.2, 1997, Jakarta

Makalah:

Hendra Halwani, *Konsepsi Daya Saing Bagi Pemerintah Daerah*, Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, Mei 2006, Jakarta

Mustopadidjaja, *Reformasi Birokrasi Perwujudan Good Governance dan Pembangunan Masyarakat Madani*, Silaknas ICMI 2001, Jakarta

-----, *Format Birokrasi NKRI Bagi Percepatan Pemulihan dan Pembangunan Nasional*, IBSW, April 2002, Jakarta

-----, *Peningkatan Peran Administrasi Negara Melalui Profesionalisme Birokrasi, Orientasi Perguruan Tinggi STIA-LAN*, Januari 2003, Jakarta

-----, *Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*, Lokakarya Pembangunan Hukum, Departemen Kehakiman dan HAM, Juli 2003

Paskah Suzetta, *Reformasi Birokrasi Negara Dalam Perspektif Pembangunan Perekonomian Nasional*, Bappenas, 28-29 Maret 2006

M.Aries Djaenuri, *Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, disampaikan dalam seminar Pengayaan Evaluasi Kebijakan Reformasi Kebijakan Publik, Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor, BPPENAS, Jakarta 17 Oktober 2013

Ministry of National Planning&Development, *Customer Centric Strategy to Delivery Excellent Public Service And Support Breaucracy Reforms*, disampaikan pada seminar Pengayaan Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor, BAPPENAS, Jakarta 17 Oktober 2013

Tri Widodo W. Utomo, *Memperkuat Kerangka Regulasi Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan*, disampaikan pada seminar Pengayaan Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, Direktorat Evaluasi Kinerja

Pembangunan Sektoral, BAPPENAS, Jakarta 17 Oktober
2013

Reformasi Administrasi Publik di Indonesia¹¹⁸

Oleh. Dede Mariana



A. Pendahuluan

Administrasi publik atau administrasi negara sebenarnya bukanlah kajian baru di Indonesia, bahkan kajian ini sempat berkembang pesat sejalan dengan perkembangan praktik tata pemerintahan. Kondisi inilah yang mengidentikan administrasi publik (*public administration*) dengan administrasi negara yang sebagian besar perspektifnya berfokus pada negara (*state centris*). Reformasi administrasi publik sebagai salah satu bidang kajian administrasi yang selalu menarik untuk dikritisi. Secara teoritis, lahirnya gejala ini sebagai akibat logis dari adanya kecenderungan pergeseran perkembangan ilmu administrasi publik yang beralih dari *normative science* ke pendekatan *behavioral-ekologis*.

Administrasi publik berkenaan dengan administrasi dalam lingkup negara, sering pula diartikan sebagai pemerintah. Seperti halnya dalam genus-nya, administrasi, adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan konsep yang mendasar dalam administrasi publik. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu; pada setiap waktu, tempat, bidang, atau tingkatan, bahkan kegiatan tertentu, terdapat tujuan-tujuan tertentu. Tetapi sebagai negara tentu harus ada asas, pedoman, dan tujuan, yang menjadi landasan kerja administrasi publik. Pada umumnya (meskipun tidak semuanya) gagasan-gagasan dasar tersebut ada dalam konstitusi negara yang bersangkutan.

¹¹⁸ Tulisan ini pernah disampaikan sebagai bahan ceramah pada Diklat Jabatan Fungsional Penjenjangan Perencana Muda, oleh Badiklat Jabar dan LP3E FE Unpad-PWK ITB. Ditulis ulang untuk Jurnal Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

organisasi pemerintah merupakan bagian dari dan berkaitan erat dengan sistem politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

F. Penutup

Keberhasilan reformasi administrasi publik sangat tergantung pada berbagai faktor, antara lain: (1) dukungan dan komitmen dari pemimpin politik; (2) adanya agen (inti) pembaru; (3) adanya lingkungan sosial ekonomi dan politis yang kondusif; serta (4) waktu yang tepat. Strategi yang berkenaan dengan sifat dan ruang lingkup pembaruan administratif haruslah dirancang melalui kerja sama yang harmonis antara pemimpin politik dan para pembaru, di mana mereka berdua harus memperhatikan faktor lingkungan yang ada.

Sifat dan ruang lingkup reformasi administrasi juga tergantung pada tersedianya sumber daya, baik dana maupun tenaga (SDM). Karena pada umumnya daerah kekurangan dana maupun tenaga sehingga akan mengalami banyak kesulitan jika menerapkan pendekatan makro atau komprehensif. Dengan demikian, maka pendekatan mikro atau inkremental akan lebih cocok bagi daerah-daerah yang kondisinya beragam. Reformasi administrasi mencakup perubahan yang menyusup ke seluruh jaringan birokrasi sebab birokrasi daerah dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga reformasi administrasi publik perlu diimbangi dengan pembenahan pada struktur dan kultur birokrasi sebagai orang-orang yang nantinya akan menjalankan reformasi administrasi publik.

Daftar Pustaka

- Caiden, Gerald E. 1968. *Prospects for Administrative Reform in Israel*. Public Administration.
- _____. 1982. *Public Administration*, 2nd Ed. California: Palisades Publishers.

- Charlesworth, James C. (ed.). 1968. *The Theory and Practice of Public Administration: Scope, Objectives, and Methods*. Philadelphia: The American Academy of Political and Social Science.
- Chilcote, Ronald H. 1981. *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, Colorado: Westview Press.
- Dror, Yereimiah. 1971. *Strategies for Administrative Reform*. The Hague, Netherland: Development and Change.
- Frederickson. 1994. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Henry, Nicholas. 1975. *Public Administration and Public Affairs*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Kartasasmita, Ginandjar. "Perkembangan Pemikiran mengenai Administrasi Pembangunan", download dari www.ginandjar.com
- Kartono, Drajat Tri. 2006. "Reformasi Administrasi: Dari Reinventing ke Pesimisme". Dalam Jurnal *Spirit Publik*, Volume 2, No. 1, April.
- Perry, James L. (ed). 1996. *Handbook of Public Administration, Second Edition*. California: Jossey-Bass Inc.
- Rais, Sasli dan Dance Y. Flassy. "Reformasi Administrasi Publik Untuk Membangun Daya Saing Daerah: Kajian Perspektif Resource Based". Download dari <http://p2dtk.bappenas.go.id/referensi/Reformasi%20Adm%20Publik%20Membangun%20Daya%20Saing%20Daerah,%20Perspektif%20Resource%20Based.pdf>
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.

Filsafat Pemerintahan Augustinus (354-430)

Oleh. Utang Suwiryo



A. Pendahuluan

Sebelum kita membicarakan pemikiran-pemikiran Augustinus di bidang pemerintahan, baiklah kita tinjau sepintas kilas tentang keadaan yang melatarbelakangi kehidupan dia. Yang menjadi dasar pandangan hidup pada jaman pertengahan adalah Ketuhanan, sehingga pemikiran-pemikiran tentang negara dan hukum yang timbul dari rasio yang sehat kurang berarti. Ilmu pengetahuan hasil pemikiran manusia diabaikannya. Dengan demikian agama Kristen sejak semula telah menimbulkan persoalan baru, yaitu persoalan hubungan gereja dan negara, oleh karenanya ia membawa sikap yang revolusioner terhadap penguasa duniawi. Kaisar-kaisar menganggap ini sebagai alasan untuk mengusut secara kejam sekte kaum Kristen itu, akan tetapi pengusutan-pengusutan itu hanya mengakibatkan bertambah banyaknya jumlah penganut-penganut mereka. Aliran rohani baru itu terbukti tak dapat dibasmi; aliran itu mencari kebahagiaan akhirat sambil menolak keduniawian dan oleh karena sikap hidupnya yang saleh itu, ia merupakan lawan yang besar dengan aliran pelanggar norma yang ada pada waktu itu.

Dengan runtuhnya nilai dan tatasusila peradaban Romawi, maka tak dapat dicegah keruntuhan ketatanegaraan, tetapi sebaliknya kekuatan agama Kristen berkembang terus dan lama kelamaan menggantikannya.

Para kaisar kemudian memberi hati dan peluang kepada kaum Kristen, Commodus (180 - 192 M) merupakan kaisar pertama yang membolehkan mereka eksis dan tumbuh di sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Suhelmi, 2007. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama,
- Charles C. Ryric, 1991 *Teologi Dasar I*, Yogyakarta, Perati Andi.
- Ebenstein, William.,1970., *Modern Political Thought*, Oxford, IBH Publishing Co.
- Firdaus Syam,M.A. *Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat dan pengaruhnya terhadap Dunia ke 3*,Bumi aksara,2007, hal.47
- Joseph Losco-Leonard William. *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*, Edisi kedua, (Volume 1) Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Joseph Losco-Leonard William. *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*, Edisi kedua, (Volume 2) Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Ibrahim, Anis.,2008. *Legislasi dan Demokrasi.*, Malang., In TRANS Publishing.
- Noer, Deliar.1983 *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Jakarta Rajawali Press
- Sabine, GH.,1981. *Teori-Teori Politik: Sejarah pertumbuhan dan Perkembangannya (1).*, Bandung, Binacipta
- Sabine, GH.,1981. *Teori-Teori Politik: Sejarah pertumbuhan dan Perkembangannya (2).*, Bandung, Binacipta
- Von Schmid, Diterj. Boentarmen,1954. *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum.*, Jakarta, PT Pembangunan,
- Von Schmid, Diterj. Wiratno,1980., *Ahli- Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum.*, JakartaPT Pembangunan.